



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "**

**"CAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN  
BANYUMAS PASCA MDGs DALAM PERSPEKTIF REGIONAL  
DAN NASIONAL"**

Oleh

**"Soetji Lestari, Sofa Marwah, Oktafiani Catur Pratiwi"**

**"Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman"**

**"soetjilestari123@gmail.com"**

**ABSTRAK**

Hasil analisis awal menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas pada akhir program MDGs tahun 2015 berada pada posisi di bawah capaian angka regional Jawa Tengah dan Nasional. Untuk itu makalah ini bertujuan untuk mengkaji capaian IPG di Kabupaten Banyumas pasca program MDGs, sejauh mana terjadi perubahan posisi baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kajian didasarkan pada analisis data sekunder yang bersumber dari buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018" yang diterbitkan oleh KPPPA dan BPS. Hasil analisis memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, namun pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas 2019 yang menghasilkan kenaikan anggota legislatif perempuan merupakan tantangan tersendiri untuk meningkatkan capaian IDG di Kabupaten Banyumas baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Kata Kunci : *Indeks Pemberdayaan Gender, Ketimpangan Gender*

**ABSTRACT**

Preliminary analysis results show the Gender Empowerment Index (IDG) in Banyumas Regency at the end of the 2015 MDGs program depending on the position below the Central Java and National figures. For this reason, this paper is intended to examine the achievements of the IPG in Banyumas Regency after the MDGs program, to discuss where there has been a change in position both at the provincial and national levels. The study is based on an analysis of secondary data sourced from the book "Gender-Based Human Development in 2018" published by KPPPA and BPS. The results of the analysis reversed IDG in Banyumas Regency after the MDGs reversed the decline from 67.37 (in 2015) to 67.32 (in 2017). Although the reduction rate is not too significant, in the same period the achievement of IDG at the provincial level and a significant national increase. Low IDG in Banyumas Regency is still contributed by all components of IDG indicators, namely women who sit in the legislative institution, women who become managers, and contribute women in household income. The election of legislative members in the 2019 Banyumas Regency which resulted in an increase in women legislative members is a special challenge to improve the achievement of IDG in the Banyumas Regency both at the provincial and national levels.



*Key words: Gender Empowerment Index, Gender Inequality*

## **PENDAHULUAN**

Isu kesenjangan gender dalam pembangunan telah lama menjadi perhatian Dunia, dan juga Pemerintah Indonesia. Pembangunan yang awalnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bergeser Telah menjadi komitmen dunia (yang diprakarsai oleh badan dunia PBB/UNDP) untuk memperkenalkan konsep pembangunan manusia yang responsif gender melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 1995-an. Konsep ini kemudian dipertegas dengan dideklarasikannya Millenium Development Goals (MDGs) dimana salah satu tujuannya adalah mendorong tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015. Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia (Bappenas, 2011).

Deklarasi Milenium tahun 2000 menegaskan tujuan-tujuan utama pembangunan internasional (*Millenium Development Goals/MDGs*), yaitu:

1. Menaggulangi kemiskinan ekstrim dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar universal
3. Mempromosikan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Membasmi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk kerja sama pembangunan

Program ini telah ditargetkan tercapai pada tahun tahun 2015 dan kemudian pasca MDGs dilanjutkan dengan program SDGs (Sustainable Development Goals).

Hasil kajian yang dilakukan BPS, Bappenas, dan UNDP menunjukkan bahwa kesetaran gender di suatu daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui hasil analisis Lestari, dkk (2017) mengenai potret pembangunan manusia berbasis gender yang ada (IPG dan IDG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 (sebagai tahun akhir target program MDGs) memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas berada di bawah level regional maupun nasional. Rendahnya IPG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh komponen tingginya *gender gap* pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan di bawah angka regional dan nasional, sementara pengeluaran perkapita laki-laki ada



di atas angka regional dan nasional, sehingga terjadi *gender gap* yang cukup tinggi. Sementara rendahnya IDG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh semua komponen IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif (18 persen), perempuan yang menjadi manajer (45,90 persen), dan sumbangan pendapatan rumah tangga (31,29 persen). IDG Kabupaten Banyumas ini juga berada di bawah angka regional dan nasional.

Untuk itu makalah bertujuan untuk mengkaji capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) atau *Gender Empowerment Measure/Index* (GEM) di Kabupaten Banyumas pasca program MDGs (tahun 2017), sejauh mana terjadi perubahan posisi baik itu pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian mengenai "Capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) di Kabupaten Banyumas ini didasarkan pada analisis data sekunder yaitu yang bersumber pada buku *Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2018* yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam buku tersebut berisi data tahun 2017. Tahun 2017 dipilih sebagai bahan analisis karena sebagai tahun pasca pelaksanaan MDGs yang antara lain tujuannya adalah capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melihat hasil capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas digunakan analisis komparasi dengan menggunakan hasil capaian di tingkat provinsi Jawa Tengah dan nasional dengan sumber data yang sama, sehingga memiliki nilai komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam sambutannya pada buku PMBG 2018, Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan nasional meliputi tiga hal yaitu: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya dalam Pengarusutamaan Gender sasaran utamanya adalah: 1. meningkatnya IPG (metode baru, menggantikan selisih IPM dan IPG seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019), 2. Menurunnya Indeks Ketidakesetaraan Gender (IKG), dan 3. meningkatnya IDG secara periodik.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak yang menggambarkan kebutuhan pokok manusia. Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis



kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Pemerintah Indonesia menargetkan IDG pada RPJMN 2015-2019 semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis Lestari, dkk (2017) berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan KPPPA dan BPS pada akhir tahun program MDGs (2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2015 masih berada di bawah angka provinsi (Jawa Tengah) dan angka nasional (Indonesia). Ini artinya juga di bawah rata-rata dunia (tahun 2015 71,05). Namun dua tahun pasca pelaksanaan akhir program MDGs, posisi capaian IPM di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya ketimpangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang cukup timpang sehingga menghasilkan **Indeks Pembangunan Gender** yang rendah baik dalam skala regional dan nasional, sebagaimana terlihat dalam tabel 1 di bawah.

Tabel 1. IPM, IPG dan Komponennya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Wilayah	Harapan Hidup (tahun)		Harapan lama sekolah (tahun)		Rata-rata lama Sekolah (tahun)		kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Kab. Banyumas	71,39	75,17	12,88	12,63	7,93	7,11	15.499	7.359	75,5	
Jawa Tengah	72,16	76,02	12,52	12,63	7,79	6,78	14.214	9.207	74,48	68,48	91,94
Indonesia	69,16	73,06	12,78	12,93	8,56	7,65	14.932	8.752	74,85	68,08	90,96

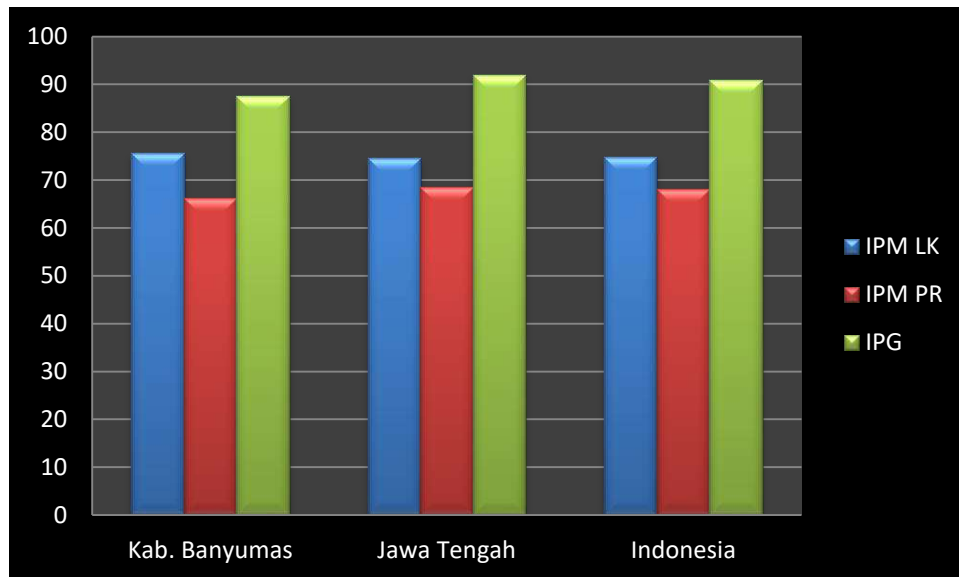
Sumber data: KPPPA dan BPS (2018)

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bagaimana kesenjangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada pasca MDGs (2017). Pada IPM laki-laki Kabupaten Banyumas memiliki capaian tertinggi (75,5) dibanding di tingkat Jawa Tengah (74,48) dan nasional (74,85). Sebaliknya pada IPM perempuan Kabupaten Banyumas memiliki capaian IPM terendah (66,15) dibanding IPM perempuan Jawa Tengah (68,48) dan nasional (68,08). Kesenjangan gender IPM laki-laki dan IPM perempuan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada pasca MDGs (2017) tersebut menghasilkan capaian IPG yang rendah (87,62) dengan perbedaan cukup signifikan di level regional (91,94) dan nasional (90,96). Komponen yang menyumbangkan kesenjangan gender pada capaian IPG adalah "Pendapatan Perkapita yang disesuaikan". Padahal sebagaimana sudah diungkap di atas hasil kajian yang dilakukan BPS, Bappenas, dan UNDP menunjukkan bahwa kesetaraan gender di suatu daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Artinya, semakin



tinggi partisipasi perempuan, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Perbedaan IPM laki-laki dan IPM perempuan secara lebih lebih jelas terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

IPM dan IPG adalah merupakan ukuran yang menyangkut kebutuhan/kualitas dasar manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowering Measurement* adalah merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/ partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi Partisipasi Politik menggunakan indikator proporsi (keterwakilan) perempuan dan laki-laki di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD); Dimensi Partipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan menggunakan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan; Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi menggunakan indikator perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki (KPPPA dan BPS 2012).

Apabila IPM dan IPG menggambarkan kebutuhan pokok, maka IDG merupakan gambaran capaian sebagaimana yang ditargetkan oleh MDGs yakni, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat meningkatkan *bargaining position* perempuan dalam proses pembangunan, sesuai dengan pendekatan Gender dan Pembangunan. Dalam pendekatan Gender dan Pembangunan, perspektif gender dapat dilihat dari lima tingkatan pemberdayaan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*  
19-20 November 2019  
Purwokerto

---

- Tahap pertama, yaitu tahap kesejahteraan, yakni tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, seperti gizi, persediaan makanan, dan pendapatan
- Tahap kedua, yaitu tahap akses yaitu untuk melihat apakah terdapat kesenjangan gender yang muncul akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan pelayanan
- Tahap ketiga, yaitu tahap kesadaran kritis. Pada tahap ini harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki dan perempuan untuk melihat bahwa apakah ada praktik-praktik diskriminasi gender di antara mereka
- Tahap keempat, yaitu tahap partisipasi yaitu harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan
- Tahap kelima, yaitu tahap kontrol yaitu untuk melihat apakah terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan

Secara kuantitatif capaian pemberdayaan perempuan dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hasil analisis awal oleh Lestari, dkk (2017) menunjukkan bahwa capaian perkembangan IDG di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010 sampai tahun 2015 relatif lambat dibanding capaian IDG di tingkat provinsi. Tahun 2010 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi tidak terlalu jauh, yakni 1,39, namun pada tahun 2015 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi meningkat menjadi 6,53. Bahkan pada tahun 2014, IDG Kabupaten Banyumas sempat mengalami penurunan di saat IDG Jawa Tengah justru meningkat tajam. Namun pada tahun 2015 IDG Kabupaten Banyumas meningkat cukup signifikan, sementara kenaikan IDG di tingkat provinsi hanya kecil. Meskipun ada kenaikan IDG yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2014-2015, namun capaian IDG di Kabupaten Banyumas masih jauh di bawah capaian IDG tingkat provinsi. Artinya capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas belum memuaskan sebagaimana yang ditargetkan oleh MDGs pada tahun 2015. Hal ini terkait dengan komponen masih rendahnya partisipasi politik dan ekonomi perempuan di Kabupaten Banyumas

Sementara data tabel 2 di bawah adalah capaian IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs yang ternyata tidak banyak mengalami perubahan.





Tabel 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sbg Tenaga Manajer, Profesional, Adm, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG
	(%)	(%)	(%)	
Kab. Banyumas	18,00	43,59	30,35	67,32
Jawa Tengah	24,00	46,97	34,13	75,10
Indonesia	17,32	46,31	36,62	71,74

Sumber data: KPPPA dan BPS (2018)

Apabila hasil kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa tujuan MDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015 di Kabupaten Banyumas belum sebagaimana yang diharapkan, pasca MDGs IDG Kabupaten Banyumas justru semakin menurun. Tabel 2 memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, sementara pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Faktor rendahnya penghasilan perempuan (feminisasi kemiskinan) yang ada memberikan dampak terhadap upaya capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 memberikan harapan baru bagi upaya peningkatan capaian Indeks Pemberdayaan Gender dibanding dengan periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019 dari 45 anggota legislatif Banyumas, hanya ada 18 persen anggota perempuan, masih jauh dari angka 30 persen. Di tingkat nasional juga hanya 17,32 persen. Dalam analisis Hubeis (2010) bahwa situasi politik yang ada masih menempatkan para perempuan politisi dalam situasi diskriminasi politik berbasis gender yang membuat mereka tidak lagi menjadi mitra politik yang dikawal dengan *affirmative action* (quota 30 persen keterwakilan perempuan), melainkan harus berjuang sendiri sebagai layaknya seorang politisi kawakan yang harus berjuang dengan prinsip-prinsip demokratis dan *fairness*. Dengan kondisi ini ketimpangan gender dalam bidang politik akan tetap tinggi.

Pada tahun 2019 ini jumlah anggota legislatif perempuan meningkat 4 persen dibanding pada sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel 3 di bawah.



Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan 2019

No	Partai	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2015	2019	2015	2019	2015	2019
1.	PDI - P	12	13	4	4	16	17
2.	PKB	4	5	3	3	7	8
3.	Gerindra	5	5	1	2	6	7
4.	Partai Golkar	6	6	0	0	6	6
5.	PKS	4	3	0	1	4	4
6.	PAN	4	3	0	0	4	3
7.	PPP	3	1	0	1	3	2
8.	Nasdem	1	2	0	0	1	2
9.	Demokrat	3	1	1	0	3	1
<b>Banyumas</b>		<b>41</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>82,0</b>	<b>78,0</b>	<b>18,0</b>	<b>22,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Direkap dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 3 di atas jumlah anggota legislatif mengalami peningkatan dari 18 persen pada pemilu tahun 2014 menjadi 22 persen pada pemilu tahun 2019 atau meningkat 4 persen (penambahan 2 orang). Penambahan suara diperoleh dari Partai Gerindra dan PKS. Dari 9 partai yang memiliki kursi di DPRD, perempuan hanya tersebar dalam 5 partai. Perempuan terbanyak berasal PDI-P (4 kursi dari 11 kursi perempuan). Hal ini dapat dipahami mengingat PDI-P menguasai sekitar 30 persen kursi yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas. Bagaimanapun keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting untuk melihat bagaimana perempuan memiliki *bargaining power*, dimana perempuan bisa terlibat dalam keputusan-keputusan politis yang strategis untuk kemaslahatan umat, khususnya menyangkut perbaikan kaum perempuan

## KESIMPULAN

Hasil analisis memperlihatkan bahwa IDG di Kabupaten Banyumas pasca MDGs justru mengalami penurunan dari 67,37 (tahun 2015) menjadi 67,32 (tahun 2017). Meskipun angka penurunan tidak terlalu signifikan, namun pada periode yang sama capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya IDG di Kabupaten Banyumas masih disumbangkan oleh semua komponen indikator IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif, perempuan yang menjadi manajer, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas 2019 yang menghasilkan kenaikan anggota legislatif perempuan merupakan tantangan tersendiri untuk meningkatkan capaian IDG di Kabupaten Banyumas baik di tingkat provinsi maupun nasional.





## DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin; Desta Fauzan A., Warastri Laksdiasri, Ayu Rahmaningtyas. 2015. "Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia" dalam *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015*, Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016. *Banyumas Dalam Angka 2016*, Purwokerto.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*, Jakarta.
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, Jakarta.
- Lestari, Soetji, Sofa Marwah, Oktafiani Catur P., 2017. "Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2015", *Prosiding dalam Seminar Nasional dan Call Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 17-18 November 2017* di Purwokerto
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2015 – Work for Human Development*. [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015\\_human\\_development\\_report.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf) diakses pada 2 November 2017 jam 08.02